**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sejak bergulirnya era reformasi, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan-perubahan sistem bernegara. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, euphoria reformasi juga ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran.[[1]](#footnote-2) Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan dan kemajuan daerah yang lebih baik dari sebelumnya serta memupuk demokrasi lokal sehingga pemekaran daerah menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia.[[2]](#footnote-3)

Pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya tentunya setelah memperhatikan syarat-syarat pemekaran wilayah yang meliputi syarat administratif, syarat fisik, maupun syarat teknis.[[3]](#footnote-4)

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu wilayah, diperlukan sosok yang bisa melakukan pembinaan pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan peranan tugas dan fungsi yang dipercayakan. Pembinaan itu melalui fungsi-fungsi pemberian bimbingan, petunjuk, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, pemantauan evaluasi dan pengembangan serta penentuan kebijaksanaan.[[4]](#footnote-5) Begitu juga dalam pemerintahan kecamatan, baik yang telah lama terbentuk maupun yang baru saja dimekarkan dalam penyelenggaraannya memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 126 (1) ditegaskan bahwa “Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya pada pasal 126 ayat (2) dikatakan bahwa “Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Lebih lanjut kedudukan Camat dalam pemerintahan ditegaskan dalam pasal 14 (2) PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatakan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.[[5]](#footnote-6) Dengan demikian, Kecamatan dipandang sebagai satuan wilayah kerja camat atau merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam PP.No 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).[[6]](#footnote-7)

Diaturnya tugas dan kewenangan camat dan kecamatan dalam PP. No. 19 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dikarenakan keduanya pemerintah kecamatan mempunyai peranan penting dalam pelayanan masyarakat dan kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonom yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Adapun pembinaan pemerintah di daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan peranan tugas dan fungsi yang dipercayakan. Pembinaan yang diberikan pemerintah di daerah terkait dalam hal pemberian bimbingan, petunjuk, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, pemantauan evaluasi dan pengembangan serta penentuan kebijaksanaan yang bertujuan dalam memajukan suatu daerah yang dipimpinnya.

Suatu sistem kepemimpinan selalu memerlukan kesetiaan dari orang-orang yang dipimpin. Oleh karena itu, dalam kalangan masyarakat yang menerima pimpinan, selalu terdapat anggapan istimewa terhadap pemimpinnya. Seorang pemimpin pasti mempunyai kelebihan dan itulah yang membuatnya menjadi pemimpin.[[7]](#footnote-8) Sehingga dalam masa pemeritahannya keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

 Kecamatan Gantarangkeke memiliki luas wilayah 52,95 $km^{2}$ atau 13,38 % dari Kabupaten Bantaeng, yang meliputi 6 desa/kelurahan yang terluas wilayahnya adalah Desa Kaloling dengan luas $17,46 km^{2}$ disusul Desa Layoa dengan luas $12,78 km^{2}$ sedang desa/kelurahan yang wilayahnya terkecil adalah Kelurahan Gantarangkeke yaitu sekitar $3,11 km^{2}$.[[8]](#footnote-9)

Saat masih tergabung menjadi wilayah Kecamatan Pajjukukang, pengelolaan sumber pendapatan kelurahan/desa yang saat ini berada di bawah kekuasaan Kecamatan Gantarangkeke diatur oleh Pemerintah Kecamatan Pajjukukang. Luasnya wilayah, tingginya jumlah penduduk serta letak desa-desa yang terlalu jauh dari Ibukota kecamatan membuat pemerintah kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sehingga rata-rata pembangunan dimulai dari wilayah terdekat dari ibu kota kecamatan. Sistem ini tentu saja dianggap tidak berjalan secara efektif, karena upaya pembangunan belum menjangkau sebagian besar daerah pedesaan sekitar Gantarangkeke. Sampai pada tahun 2005 pembangunan dan pelayanan kecamatan di daerah pedesaan sekitar Gantarangkeke belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pembangunan fisik belum dilakukan secara merata.[[9]](#footnote-10)

Saat Muhammad Nur Alam diangkat menjadi camat pertama di Kecamatan Gantarangkeke pada tahun 2006 ia menfokuskan pembangunan fisik di kecamatan yang baru saja dimekarkan tersebut seperti pembangunan Kantor Kecamatan dan Pembangunan Puskesmas inti. Menjadi camat bukanlah pekerjaan mudah, tapi sosok Muhammad Nur Alam berhasil menanamkan pondasi pemerintahan di Gantarangkeke sehingga bisa dijadikan acuan oleh camat berikutnya Syamsul Bahri pada tahun 2009 dalam melanjutkan program kerja yang belum terselesaikan. Setelah masa pemerintahan Syamsul Bahri berakhir, diangkatlah Sahabuddin pada tahun 2012 sebagai Camat ketiga yang bertugas dalam membangun, memperbaiki dan memajukan pembangunan di Kecamatan Gantarangkeke.

Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana keadaan Kecamatan Gantarangkeke terutama perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah dibentuk menjadi sebuah kecamatan dalam kurun waktu 2006-2015.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menfokuskan pada tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Kecamatan Gantarangkeke?
2. Bagaimana kondisi Gantarangkeke sebelum pemekaran tahun 2006?
3. Bagaimanakah perkembangan Kecamatan Gantarangkeke tahun 2006-2015?
4. **Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian sejarah mempunyai tiga ruang lingkup penelitian yakni batasan tematik, batasan spasial dan batasan temporal.

1. Batasan Spasial

Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah secara sistematis dan analitis, maka cakupan wilayah (spasial) berada pada daerah Kabupaten Kecamatan Gantarangkeke yang terdiri dari enam desa/kelurahan yakni, Kelurahan Gantarangkeke, Kelurahan Tanahloe, Desa Bajiminasa, Desa Layoa, Desa Kaloling, dan Desa Tombolo.

1. Batasan Temporal

Batasan temporalnya adalah tahun 2006-2015, didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 2006 merupakan periode awal terbentuknya kecamatan dan pemerintahan di Gantarangkeke. Sedangkan tahun 2015 dipilih sebagai batas akhir penelitian untuk mempermudah mengetahui perkembangan Gantarangkeke setelah dibentuk menjadi kecamatan dalam tiga masa pemerintahan.

1. Batasan Tematik

Sesuai dengan judul proposal yakni “Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng Tahun 2006-2015 (Suatu Tinjauan Sejarah)” maka aspek tematiknya dibatasi pada keadaan atau kondisi masyarakat wilayah Kecamatan Gantarangkeke pada saat itu, penataan wilayah administratif serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam membangun Kecamatan Gantarangkeke.

1. **Tujuan Penelitian**

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya maka tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui gambaran umum Kecamatan Gantarangkeke.
2. Untuk mengetahui kondisi Gantarangkeke sebelum pemekaran tahun 2006.
3. Untuk mengetahui perkembangan Kecamatan Gantarangkeke tahun 2006-2015.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan antara lain :

1. Menjadi sumber informasi untuk mengetahui gambaran umum Kecamatan Gantarangkeke.
2. Menjadi sumber data dan informasi untuk mengetahui kondisi Gantarangkeke sebelum pemekaran kecamatan hingga kondisi Kecamatan Gantarangkeke dalam masa pemerintahan sejak masa dimekarkannya sebagai sebuah kecamatan baru.
3. Sebagai acuan penulis atau peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam pembahasan tentang pembentukan dan pemerintahan di wilayah kecamatan.
4. **Penelitian Relevan**

Salah satu kegiatan dalam penulisan karya ilmiah yang patut dilakukan adalah proses kegiatan tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka meliputi buku, jurnal, skripsi maupun tesis. Pembahasan mengenai pembentukan atau pemekaran daerah dan wilayah yang merupakan implementasi dari Otonomi Daerah di Indonesia telah dibahas dalam banyak buku diantaranya Pheni Chalid dalam buku *Otonomi Daerah : Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik* serta masih banyak buku yang membahas mengenai penerapan Otonomi Daerah di Indonesia.[[10]](#footnote-11)

*Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah* oleh Drs. Tjahya Supriatna[[11]](#footnote-12) dan *Hukum Pemerintahan Daerah[[12]](#footnote-13)* yang ditulis oleh Lukman Santoso Az juga masing-masing membahas pentingnya peran pemerintah di suatu daerah serta problematika pemekaran daerah pasca Reformasi di Indonesia juga dijadikan referensi untuk mengetahui masalah dan kendala apa saja yang dihadapi daerah yang telah dimekarkan.

Selain buku umum, ada buku-buku yang secara khusus membahas Kecamatan Gantarangkeke antara lain, *Buku Data Kecamatan Gantarangkeke Dalam Angka[[13]](#footnote-14), Selayang Pandang Kecamatan Gantarangkeke[[14]](#footnote-15)*, *Statistik Kecamatan Gantarangkeke[[15]](#footnote-16),* *Proposal Kegiatan Kerja Kecamatan Gantarangkeke[[16]](#footnote-17), Rencana Tata Ruang Kecamatan Gantarangkeke[[17]](#footnote-18)*, *Sejarah Kerajaan Tanah Loe Gantarangkeke*[[18]](#footnote-19), dan *Lembaran Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang Pemekaran Kecamatan Gantarangkeke[[19]](#footnote-20).*

Selain buku, sumber acuan lain yang membahas tentang Pemekaran Daerah maupun Pemerintahan adalah Skripsi, Tesis maupun Jurnal. Skripsi yang berjudul “Barru Pada Masa Pemerintahan H. Andi Muhammad Rum (2000-2010)” karya Irma Erviana secara terperinci membahas masalah Pemerintahan di Kabupaten Barru apa saja perubahan yang dialami Kabupaten Barru baik selama pemerintahan H. La Nakka maupun H. Andi Muhammad Rum menjabat sebagai Bupati.[[20]](#footnote-21) Skripsi Rima Afrianti dengan judul “Peran Camat dalam Membina Perangkat Desa” yang mengungkapkan tentang pentingnya peran camat sebagai pembina perangkat desa dalam melakukan pembinaan lembaga-lembaga desa walaupun dalam perkembangannya ada faktor yang menghambat terjadinya hal tersebut.[[21]](#footnote-22) Ratry Furry Pustika R dengan judul skripsi “Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah”.[[22]](#footnote-23)

Jurnal yang ditulis Ishaq Iswahyudi dengan Judul “Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar” menjelaskan bagaimana pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh camat dan kecamatan dalam hal pelayanan masyarakat.[[23]](#footnote-24) Jurnal Nunik Retno Herawati ”Pemekaran Daerah di Budiman Silalahi dalam Tesis “Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pengembangan Wilayah (Penelitian Di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun)” menjelaskan tentang Dampak pemekaran kecamatan terhadap wilayah Kecamatan Panombeian Panei dan pendapat masyarakat terrhadap kebijakan –kebijakan pemerintah dalam membangun kecamatan.[[24]](#footnote-25)Indonesia” membahas tentang pemekaran yang ada di Indonesia beserta faktor pendukung penghambatnya.[[25]](#footnote-26)

1. **Metode Penelitian**

Dalam usaha mengungkapkan dan merekonstruksi pengetahuan tentang masa lampau yang mendekati kebenaran dan keobjektifan, maka dilakukan penelitian berdasarkan ilmu sejarah. Hal ini bertujuan agar objek kajian dapat melahirkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan penelitian tersebut maka diperlukan sebuah metode tertentu. Adapun metode-metodenya yaitu sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber. Untuk memperoleh sumber atau data yang akurat, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang baik dan benar. melalui buku-buku dan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji sumber yang terkait dengan kegiatan penelitian berupa buku elektronik, skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku cetak yang didapatkan pada Perpustakaan umum Universitas Negeri Makassar maupun melalui akses internet, Perpustakaan Daerah, data statistik dari lembaga setempat serta hasil wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi penelitian.

1. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum digunakan. Karena tidak semua sumber yang didapat bisa langsung digunakan dalam penulisan. Aspek yang dikritik adalah keaslian sumber dan tingkat kebenaran informasi.[[26]](#footnote-27) Adapun kritik sumber terbagi atas dua yaitu :

1. Kritik Ekstern

Terhadap sumber lisan jika memang menggunakan teknik wawancara dilakukan terhadap informan yang akan diwawancarai, dilihat dari keterlibatannya pada suatu peristiwa serta tingkat keintelektualannya. Adapun terhadap sumber tertulis perlu dilakukan agar tidak terperangkap dalam dokumen palsu seperti jika sebuah dokumen tidak lagi utuh, seorang sejarawan harus mengadakan restorasi teks tersebut agar arti isi yang terkandung dapat diterima secara ilmiah.[[27]](#footnote-28)

1. Kritik Intern

Terhadap sumber tertulis dilakukan dengan jalan melihat kehadiran pengarang terhadap waktu atau peristiwa, kepentingan pengarang, sikap berat sebelah, serta motif pengarang juga sangat perlu untuk diketahui untuk menentukan kredibilitas tulisan.[[28]](#footnote-29)

1. Interpretasi

Setelah kritik sumber selesai, diadakanlah interpretasi atau proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua poin penting yaitu sintesis (menyatukan) dan analisis (menguraikan). Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksi dengan baik yaitu dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan dan menempatkan fakta dalam urutan kausal.[[29]](#footnote-30)

1. Historiografi

Historiografi merupakan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan sumber-sumber sejarah kemudian dipaparkan dalam bentuk kisah berdasarkan hasil interpretasi dari seorang peneliti.[[30]](#footnote-31) tentang Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng tahun 2006-2015 (Suatu Tinjauan Sejarah).

1. Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pheni Chalid, *Otonomi Daerah : Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*, (Jakarta : Kemitraan, 2005), hlm v. [↑](#footnote-ref-3)
3. Budiman Silalahi, “Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pengembangan Wilayah (Penelitian Di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun)*”Jurnal* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm.1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara,1993) hlm. 94. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rima Afrianti, “Peran Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pembinaan Bidang Administrasi),”, *Skripsi* (Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, 2009), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ishaq Iswahyudi, “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar”, *Jurnal.* (Makassar: Jurusan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014 ), hlm.2. [↑](#footnote-ref-7)
7. Irma Erviana, “Barru Pada Masa Pemerintahan H. Andi Muhammad Rum (2000-2010)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-8)
8. Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Gantarangkeke Dalam Angka.* (Bantaeng: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantaeng, 2015), hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara dengan Muh. Syamsir, *Staff Kecamatan Gantarangkeke*, 9 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pheni Chalid, *Otonomi Daerah : Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*, (Jakarta: Kemitraan, 2005). [↑](#footnote-ref-11)
11. Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara,1993). [↑](#footnote-ref-12)
12. Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). [↑](#footnote-ref-13)
13. Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Gantarangkeke Dalam Angka, (Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2007-2015).* [↑](#footnote-ref-14)
14. Badan Pusat Statistik, *Selayang Pandang Kecamatan Gantarangkeke*, (Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2015). [↑](#footnote-ref-15)
15. Badan Pusat Statistik, *Statistik Kecamatan Gantarangkeke*, (Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2014). [↑](#footnote-ref-16)
16. Kantor Kecamatan Gantarangkeke. *Proposal Program Kegiatan Baruga SAYANG.* Bantaeng: Kantor Kecamatan Gantarangkeke, 2010). [↑](#footnote-ref-17)
17. Dinas Tata Ruang dan Wasbang. *Laporan Akhir Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTR-IKK) Gantarangkeke*. (Bantaeng: Dinas Tata Ruang dan Wasbang Kabupaten Bantaeng, 2006). [↑](#footnote-ref-18)
18. Syamsul Dg. Rewa, *Sejarah Singkat Kerajaan Tanah Loe Gantarangkeke* , (Bantaeng: Buku Data Adat Gantarangkeke, 2013). [↑](#footnote-ref-19)
19. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng No.4 Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-20)
20. Irma Erviana, “Barru Pada Masa Pemerintahan H. Andi Muhammad Rum (2000-2010)”*.*  *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015). [↑](#footnote-ref-21)
21. Rima Afrianti. “Peran Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”, *Skripsi. (*Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, 2009). [↑](#footnote-ref-22)
22. Furry Ratri PR, Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah. *Skripsi.* (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013). [↑](#footnote-ref-23)
23. Ishaq Iswahyudi, “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar”, *Jurnal.* (Makassar: Jurusan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014). [↑](#footnote-ref-24)
24. Budiman Silalahi, “Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pengembangan Wilayah (Penelitian Di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun)*”Jurnal* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004). [↑](#footnote-ref-25)
25. Nunik Retno Herawati, Jurnal, “Pemekaran Daerah Di Indonesia. *Jurnal. (*Semarang : Jurusan Ilmu politik Universitas Diponegoro, 2011). [↑](#footnote-ref-26)
26. Irma Erviana, *Op.cit.,* hlm.9. [↑](#footnote-ref-27)
27. Tim Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Makassar: Bahan Ajar fakultas Ilmu Sosial, 2012), hlm.40. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,* hlm.42. [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Saleh Madjid dan Abdul Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-31)